

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, 1987. *Prinsip-Prinsip Manajemen dalam Pemerintahan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Sambada, 1999, *Kewajiban Perpajakan bagi Badan Usaha dan Orang Pribadi (Tinjauan dari Sisi Wajib Pajak)*, BPFE, Yogyakarta.
- Bohari, 1995. *Hukum Anggaran Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bohari, 1995. *Pengawasan Keuangan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brian Binder, 1989. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Alumni Bandung.
- Conyer, Diana, 1984. *Desentralisasi dan Pembangunan*, UI, Jakarta.
- Fesler, J.W., 1965. *Approaches to the Understanding of Decentralization*, Journal of Politics. Vol. 27 No. 4.
- Kaloh, J., 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah. Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Koesoemahatmadja, Rd. II, 1990, *Pemberian Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab dititikberatkan pada Daerah Tingkat II*.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Laica Marzuki, 1999. *Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Seminar Nasional, Makassar.
- Leemans, A.F., 1970. *Changing Patterns of Local Government*, IULA : The Haque.
- Mahir Raksaka, 2002. *Kebijaksanaan Bantuan Pusat ke Daerah*, UI, Jakarta.
- Manullang. M, 1989. *Beberapa Aspek Pemerintahan Daerah*, PT. Pembangunan, Jakarta.

- Maryono V.G-S., 1985. ***The Establishment of Regional Government in the Republic of Indonesian***, Bloomington Indiana University.
- Maskun, 1995, ***Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Luas***, BPFE, Jakarta.
- Memet, R.S, 1993. ***Prospek Pembangunan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mubiyarto, 2000. ***Otonomi Daerah dan Ekonomi Kerakyatan***, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mubiyarto, 2002. ***Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia***, BPFE, UBM Yogyakarta.
- Nick Devas, dkk. 1989. ***Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia***, Universitas Indonesia Jakarta.
- Nugroho, Rian D., 2000. ***Prospek Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi***, PT. Filex Media, Jakarta.
- Rasyid Riyas, 2000. ***Menuju Pelaksanaan Otonomi Daerah***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riwu Kaho, Josef, 2002. ***Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rochmat Soemitro, 2000. ***Hukum Pajak dan Undang-Undang Pajak***, Eresco, Bandung.
- Rochmat Soemitro, 2000. ***Pajak dan Pembangunan***, Eresco, Bandung.
- Rozali Abdullah, 1999, ***Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Feodalisme sebagai Suatu Alternatif***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rudini, 1992. ***Otonomi Daerah Prospek dan Tantangan (Kumpulan Tulisan)***, PT. Sinar harapan, Jakarta.
- Sarundajang, 1999. ***Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah***, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Simon, Herbert A., 1998. ***Administrative Behavior Perilaku Administrasi***, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, 1996. ***Metode Penelitian Sosial***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Soekarwo, 2004. ***Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance***, Airlangga University Press, Surabaya.
- Supriatno, 1993. ***Administrasi Pembangunan Daerah***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsir, Ibnu. 1993. ***Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen***, Bina Aksara, Jakarta.
- Wajang, J., 1985. ***Administrasi Keuangan Daerah***, PT. Iktiar, Jakarta.
- Wasistono, Nugroho, 1999. ***Beberapa Pemikiran Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah***, Arkola, Jakarta.
- Widjaya. A. W., 1986. ***Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia***, Rineka Cipta, Jakarta.
- Yusuf, Maulana, 2000. ***Perencanaan Daerah dan Implementasi Otonomi Daerah***, UI. Jakarta.

Dokumen Perundang-Undangan

1. Pasal 18 perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado.